

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xvi
BAB. I. PENDAHULUAN	I
A. Latar belakang penelitian	1
B. Perumusan masalah	14
C. Keaslian penelitian	15
D. Kegunaan penelitian	18
E. Tujuan Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Ruang Lingkup dan Pengertian	21
1. Sistem Pengambilan Keputusan	29
a. Pengambilan Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat	35
b. Pengambilan Keputusan berdasarkan pemungutan suara (voting)	38
2. Sistem Pengambilan Keputusan oleh MPR menurut UUD 1945	42

a. Sistem Pengambilan Keputusan menurut Pembukaan UUD 1945.....	42
b. Sistem Pengambilan Keputusan menurut Batang Tubuh UUD 1945	46
3. Sistem Pengambilan Keputusan menurut Ketetapan MPR	55
a. Pengambilan Keputusan menurut Ketetapan MPRS	55
b. Pengambilan Keputusan menurut Ketetapan MPR-RI	64
4. Pelaksanaan Pengambilan Keputusan oleh MPR tahun 1973-1988	73
a. Pengambilan Keputusan oleh MPR pada Sidang Umum 1973	73
b. Pengambilan Keputusan oleh MPR pada Sidang Umum 1978	74
c. Pengambilan Keputusan oleh MPR pada Sidang Umum 1983	76
d. Pengambilan Keputusan oleh MPR pada Sidang Umum 1988.....	76
B. Sistem Pengambilan Keputusan menurut Hukum Adat Minangkabau	77
C. Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat ..	86
1. Pemerintahan Nagari	86
a. Sejarah terjadinya Nagari	86
b. Organisasi Kekerabatan Matrilineal	89
c. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Nagari	93
2. Pemerintahan Desa	100
a. Sejarah dan Perundang-undangan Pemerintahan Desa	100

b. Organisasi Pemerintahan Desa	113
1. Kepala Desa.....	113
2. Lembaga Musyawarah Desa.....	118
3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	122
BAB III METODE PENELITIAN	127
A. Metode Pendekatan	127
B. Pengumpulan Data	128
C. Penentuan Sampel dan Responden	129
D. Analisis Data	133
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	137
A. Proses pengambilan keputusan menurut asas, kaidah hukum adat Minangkabau	137
B. Keadaan Pemerintah Desa/Nagari sebelum keluar dan berlakunya UU No.5/1979 di Sumatera Barat	144
1. Pengambilan Keputusan sebelum berlakunya UU No.5/1979 di desa-desa Kenagarian Batipuh Atas	148
2. Pengambilan Keputusan sebelum berlakunya UU No.5/1979 di desa-desa Kenagarian Selayo	155
C. Pelaksanaan Pemerintahan Desa setelah keluar dan berlakunya UU No.5/1979 di Sumatera Barat.....	165
1. Pengambilan Keputusan pasca berlakunya UU No.5/1979 di desa- desa Kenagarian Batipuh Atas.....	176
2. Pengambilan Keputusan pasca berlakunya UU No.5/1979 di desa-desa Kenagarian Selayo.....	196

D. Hambatan dan Kebijakan yang ditempuh terhadap pelaksanaan UU No.5/1979 di Sumatera Barat.....	218
1. Hambatan pelaksanaan UU No.5/1979 di Sumatera Barat.....	218
2. Kebijakan yang ditempuh terhadap pelaksanaan UU No.5/1979 oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat.	221
a. Pengakuan Eksistensi Nagari sebagai Kesatuan.Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat (Perda No.13/1983).....	222
b. Penataan Kembali Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa (Instruksi Gubernur No.11/1988).....	234
c. Konsepsi dan Strategi Pembangunan Pedesaan Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat (Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.17A/1990) ...	257
d. Musyawarah Pembangunan Nagari di Daerah Sumatera Barat (Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.12/GSB/1991).....	261
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	270
A. Kesimpulan	270
B. S a r a n	271
RINGKASAN	274
SUMMARY	289
DAFTAR PUSTAKA	301
LAMPIRAN	312

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa per Kabupaten se Sumatera Barat sebelum tahun 1988/1989	234
Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa per Kabupaten se Sumatera Barat setelah PWD Tahap I,II III tahun 1991.....	240
Tabel 3 Daftar : Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan akhir Pelita IV s/d Pelita V di Sumatera Barat	241
Tabel 4 Daftar : Rekapitulasi Jumlah Desa yang kembali ke Wilayah Nagari akibat PWD dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.....	243

DAFTAR SINGKATAN

APPKD	: Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Pemerintahan Daerah
DATI I	: Daerah Tingkat I
GOLKAR	: Golongan Karya
GSB	: Gubernur Sumatera Barat
I.S.	: Indische Staatsregeling
INPRES	: Instruksi Presiden
INST	: Instruksi
Jo	: Juncto
KAN	: Kerapatan Adat Nagari
KDH	: Kepala Daerah
KEPPRES	: Keputusan Presiden
LKAAM	: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau
LMD	: Lembaga Musyawarah Desa
LKMD	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MPR-RI	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
MENDAGRI	: Menteri Dalam Negeri
No.	: Nomor
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri

PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SK	: Surat Keputusan
STB	: Staatsblad
SUPERSEMAR	: Surat Perintah Sebelas Maret
TAP. MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerinahan Desa.	312
Lampiran 2.	Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 162/GSB/1983 tentang Pelak- sanaan UU No.5 Tahun 1979 di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.....	332
Lampiran 3.	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.....	336
Lampiran 4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.....	346
Lampiran 5.	Keputusan Pemerintahan Nagari Selayo No.03/Kpts/S/1979 tentang Sumbangan Ganti Rugi Tanah Perumahan Kantor Camat Kubung Selayo.....	355
Lampiran 6	Keputusan Musyawarah Pembangunan Nagari Bayur ke I Tahun 1993, tentang Penyatuan Desa Dalam Nagari Bayur...	358
Lampiran 7	Keputusan Kerapatan Adat Nagari Bayur Tahun 1990, tentang Penciutan Desa-desa Kenagarian Bayur.....	360
Lampiran 8	Pernyataan LMD dan LKMD Desa Batang Baluran Maninjau, Tahun 1993, tentang Pernyataan Tidak Setuju Desa-desa Dijadikan Satu.....	366